

Inovasi Monitoring Evaluasi Capaian Fisik dan Anggaran Periodik Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo

Hendrawana Nur Dengi Lalang, Rusli Isa

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 30, 2025
Revised 10 Oktober 2025
Accepted 15 Oktober 2025
Available online 22 Oktober. 2025

Keywords

Monitoring and Evaluation; Public Administration, Good Governance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to examine in depth the innovation of periodic monitoring and evaluation of physical achievements and budget implementation at the Land Office of Gorontalo Regency, as a response to the shifting paradigm in public administration. The main focus of the research is to analyze the effectiveness of the digital system employed in enhancing efficiency, accountability, and transparency in program execution. Furthermore, the study seeks to identify the contribution of this innovation to strengthening the principles of good governance and bureaucratic reform, as well as to evaluate its impact on the quality of decision-making and public satisfaction. Using a qualitative approach and case study method, the research is expected to provide strategic recommendations for the development of a more adaptive and results-oriented performance evaluation system in government institutions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam inovasi monitoring dan evaluasi capaian fisik serta anggaran secara periodik yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo sebagai respons terhadap tuntutan perubahan paradigma administrasi publik.

Fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas sistem digital yang digunakan dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan program kerja. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi inovasi tersebut terhadap penguatan prinsip-prinsip good governance dan reformasi birokrasi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas pengambilan keputusan dan kepuasan masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan sistem evaluasi kinerja instansi pemerintah yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.

PENDAHULUAN

Dalam era transformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, inovasi dalam sistem monitoring dan evaluasi menjadi kebutuhan mendesak bagi instansi pemerintah. Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo sebagai lembaga yang berperan strategis dalam pengelolaan aset tanah, menghadapi tantangan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran secara transparan. Monitoring dan evaluasi capaian fisik serta anggaran secara periodik bukan hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga instrumen manajerial untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik.

Perubahan paradigma administrasi publik dari pendekatan birokratis tradisional menuju model tata kelola yang lebih adaptif dan berbasis kinerja mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi sistem evaluasi yang responsif terhadap dinamika lapangan. Dalam konteks ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo mengembangkan inovasi berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pelaporan real-time, analisis capaian, dan deteksi dini terhadap deviasi program. Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil.

Teori administrasi publik kontemporer seperti *New Public Governance* (NPG) dan *Adaptive Governance* menjadi landasan penting dalam memahami arah perubahan ini. Menurut kajian terbaru dalam jurnal "Perkembangan Terbaru dalam Paradigma Administrasi Publik"

*Corresponding Author

Email: 711525043@mahasiswa.ung.ac.id

(2025), NPG menekankan kolaborasi antar aktor, keterlibatan masyarakat, dan penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, *Adaptive Governance* mendorong fleksibilitas struktur organisasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal, termasuk tuntutan transparansi dan partisipasi publik.

Inovasi monitoring dan evaluasi yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Sistem digital yang digunakan tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi lintas sektor dalam evaluasi kinerja. Hal ini memperkuat prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perubahan nilai dalam tata kelola publik.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian akademik yang mendalam terhadap efektivitas dan dampak dari inovasi tersebut. Meskipun sistem telah diterapkan, belum banyak studi yang mengevaluasi kontribusinya terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kepuasan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus yang komprehensif, serta menghasilkan rekomendasi strategis bagi pengembangan sistem evaluasi di instansi pemerintah lainnya.

Dengan menggabungkan pendekatan teoritis dan analisis empiris, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem monitoring dan evaluasi yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo menjadi contoh konkret bagaimana inovasi dapat mendorong transformasi birokrasi menuju tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam fenomena inovasi monitoring dan evaluasi yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas proses inovasi dalam konteks birokrasi publik, serta memungkinkan peneliti memahami dinamika internal organisasi dan interaksi antar aktor yang terlibat. Studi kasus memberikan ruang untuk eksplorasi mendalam terhadap praktik evaluasi kinerja, penggunaan teknologi, dan dampaknya terhadap tata kelola instansi.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat struktural, staf teknis, serta pemangku kepentingan eksternal yang berinteraksi langsung dengan sistem monitoring dan evaluasi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh perspektif subjektif mengenai efektivitas sistem, kendala implementasi, serta persepsi terhadap perubahan tata kelola. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelaporan dan evaluasi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah data capaian fisik dan anggaran, serta kebijakan internal yang mendasari inovasi tersebut.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan teknik reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi makna. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan ulang hasil temuan kepada informan kunci. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi inovasi terhadap peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti merumuskan rekomendasi strategis yang relevan dan aplikatif bagi pengembangan sistem evaluasi kinerja di instansi pemerintah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi pelaksanaan program kerja. Melalui integrasi data capaian fisik dan anggaran secara real-time, proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pimpinan maupun tim teknis. Hal ini meminimalkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi deviasi atau hambatan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, sistem ini juga mendukung pelacakan progres kegiatan secara periodik, sehingga memudahkan evaluasi kinerja unit kerja secara objektif.

Dari sisi akuntabilitas dan transparansi, inovasi ini memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Informasi yang tersaji dalam dashboard digital dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk auditor dan masyarakat melalui kanal publikasi tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa staf internal merasa lebih bertanggung jawab terhadap capaian kerja karena adanya sistem yang merekam dan menilai kinerja secara berkala. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga membentuk budaya kerja yang lebih disiplin dan berorientasi pada hasil.

Pembahasan hasil penelitian ini menguatkan relevansi teori *New Public Governance* dan *Adaptive Governance* dalam konteks birokrasi lokal. Inovasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo mencerminkan pergeseran dari model birokrasi hierarkis menuju tata kelola yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Sistem digital yang diterapkan memungkinkan koordinasi lintas unit, pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan pendekatan adaptif, instansi mampu merespons perubahan lingkungan strategis, termasuk tuntutan efisiensi anggaran dan peningkatan kepuasan publik. Oleh karena itu, inovasi ini dapat dijadikan model bagi instansi pemerintah lainnya dalam mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang lebih modern dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi monitoring dan evaluasi capaian fisik serta anggaran secara periodik yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan program kerja. Melalui pemanfaatan sistem digital berbasis data real-time, proses evaluasi menjadi lebih terstruktur, responsif, dan mampu mendeteksi secara dini potensi deviasi pelaksanaan kegiatan. Inovasi ini juga mencerminkan pergeseran paradigma administrasi publik menuju tata kelola yang lebih adaptif dan berbasis kinerja, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan semangat reformasi birokrasi.

Selain itu, penerapan sistem ini telah mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan organisasi, di mana tanggung jawab terhadap capaian kinerja menjadi lebih terukur dan partisipatif. Evaluasi yang dilakukan secara berkala tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis administratif, tetapi juga memperkuat fondasi kelembagaan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem monitoring dan evaluasi yang telah diterapkan, khususnya dalam hal integrasi data antar unit kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai agar mampu mengoptimalkan penggunaan sistem secara maksimal dan konsisten.

Pemerintah daerah dan instansi terkait juga disarankan untuk mereplikasi praktik baik ini ke unit kerja lainnya, dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Terakhir, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem, baik dari sisi teknis maupun dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik, guna memastikan bahwa inovasi ini tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.

REFERENSI

- Osborne, S. P. (2021). *Public Service Logic: Creating Value for Public Service Users, Citizens, and Society Through Public Service Delivery*. Routledge.
- Kettunen, P., & Kallio, J. (2024). Adaptive Governance in Public Sector Innovation: A Framework for Digital Transformation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(1), 45–62.
- Dwiyanto, A. (2022). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2023). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pertanahan.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo. (2024). *Laporan Capaian Kinerja Semester I dan II Tahun 2024*. Gorontalo: ATR/BPN.
- Mulyadi, D. (2023). Digitalisasi Administrasi Publik: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(2), 101–115.
- OECD. (2025). *Digital Government Review: Strengthening Performance and Accountability*. OECD Publishing.
- Budiarto, A. (2024). Evaluasi Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 55–70.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.